



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2025**



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 61
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah daerah diminta untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2).
28. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan *output* langsung.
24. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
25. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

1. memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
2. menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025,

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat provinsi dan tingkat nasional tahun 2025 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. terintegrasikannya program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. tersusunnya perubahan kebijakan dan anggaran pembangunan daerah.

BAB III
KEDUDUKAN DAN MUATAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 4

1. Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tahun 2025 terhitung mulai diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Perubahan RKPD 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang sedang dalam proses penyusunan.
3. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, bersinergi dengan RKP Tahun 2025, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Perubahan RKPD Provinsi, serta berdasarkan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.
4. Perubahan RKPD Tahun 2025 berkedudukan sebagai dokumen yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, mulai tahapan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025.
5. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Muatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memuat:

1. perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana target program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan tahun 2025;
2. pencatatan perubahan-perubahan belanja Perangkat Daerah yang berasal dari dana transfer dan/atau perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025; dan
3. target pencapaian kinerja disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- a. Seluruh data program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi Perubahan RKPD Tahun 2025, tercantum dalam SIPD-RI.
- b. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025.

BAB V
PENEKENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengoordinasikan, dan mensinergikan serta melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025.
2. Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

1. Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menjamin bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 10

1. Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
Pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

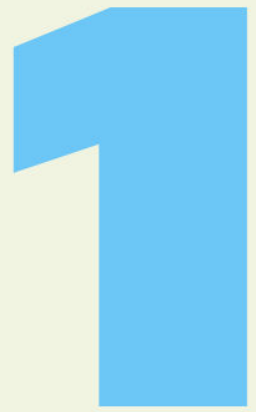
Diundangkan di Praya,
pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. L. FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR
18



PENDAHULUAN
PERUBAHAN RKPD 2025

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan sistem, Dimana Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Kebutuhan terhadap perubahan RKPD Tahun 2025 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah, yang diperoleh dari Perubahan Renja Perangkat Daerah sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen Perubahan RKPD sekurang-kurangnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik berasal dari APBD, APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD merupakan proses penyusunan Perubahan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada semester I tahun berjalan, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Perubahan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indikator kinerja utama pada Perangkat Daerah yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Rancangan Perubahan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD. Lebih lanjut Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/Sj Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2).
31. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, sebagai pedoman penyusunan KUPA – PPASP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- c. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang, memuat pengertian ringkas tentang Perubahan RKPd, kedudukan Perubahan RKPd tahun 2025 dalam periode dokumen RPJMD, Perubahan Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan, menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPd yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Perubahan RKPd, baik yang berskala nasional maupun daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPd Tahun 2025 dan hubungannya dengan dokumen RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 1.4. Sistematika Perubahan RKPd, mengemukakan sistematika Perubahan RKPd terkait dengan peraturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025, menguraikan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPd tahun berjalan sampai triwulan I dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan realisasi renstra Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah, mengemukakan permasalahan dan kondisi aktual Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan pada tahun berjalan.

Bab III ANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sumbangan sektoral, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi lainnya serta tantangan perekonomian daerah tahun 2025.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah, menjelaskan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan, memuat penjelasan tentang hubungan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun yang diambil dari dokumen RPJMD.
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025, menjelaskan tentang prioritas pembangunan tahun 2025 yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan provinsi dan pengalokasian pagu indikatif berdasarkan prioritas pembangunan.

Bab V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Bab VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.

Bab VII PENUTUP

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan untuk lebih bersungguh sungguh dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan tahun 2025.



2

**EVALUASI TERHADAP
HASIL RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
SAMPAI TRIWULAN II
PERUBAHAN RKPD 2025**

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmanakemampuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Dearah, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Perangkat Daerah telah melaksanakan program dan kegiatannya .

Realisasi keuangan sampai periode 30 Juni 2025, sebesar Rp. 906.620.465.371,- atau sebesar 34,62% dari total Anggaran Sebesar Rp. 2.618.774.169.694 sesuai dengan tabel 2.1. Sedangkan rincian realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan terlampir.

Tabel 2. 1 Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	%	Predikat Keuangan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	941.473.560.274	384.019.720.728	41	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	316.762.249.223	99.844.120.688	32	Rendah
3	Rumah Sakit Umum Daerah	160.331.424.786	52.528.049.573	33	Sedang
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.904.165.257	11.859.554.603	6	Sangat Rendah
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	55.014.818.751	8.596.141.643	16	Sangat Rendah
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.903.338.240	5.162.782.839	32	Rendah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.753.517.828	2.265.523.544	39	Tinggi
8	Dinas Sosial	7.018.635.699	2.829.121.328	40	Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.077.681.284	3.826.375.217	35	Sedang
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	16.426.942.401	4.161.337.429	25	Sangat Rendah
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.560.801.135	1.674.283.868	37	Sedang
12	Dinas Lingkungan Hidup	13.048.801.462	2.514.749.281	19	Sangat Rendah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.053.627.844	1.721.898.385	24	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	%	Predikat Keuangan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.184.869.965	5.335.155.982	58	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	19.954.664.927	8.215.312.733	41	Tinggi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	11.793.717.870	5.658.470.080	48	Sangat Tinggi
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.868.487.862	2.366.418.137	40	Tinggi
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	18.879.016.881	1.135.776.668	6	Sangat Rendah
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	8.944.045.529	2.987.933.042	33	Sedang
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.091.098.122	1.358.732.498	13	Sangat Rendah
22	Dinas Pariwisata	14.305.711.571	2.661.969.992	19	Sangat Rendah
23	Dinas Pertanian	75.868.687.147	17.281.774.459	23	Sangat Rendah
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.533.580.557	3.825.351.098	17	Sangat Rendah
25	Sekretaris Daerah	38.499.495.300	12.103.248.328	31	Rendah
26	Sekretariat DPRD	45.324.032.775	14.590.860.234	32	Rendah
27	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	13.560.456.165	4.931.829.118	36	Sedang
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	444.129.609.554	200.966.578.288	45	Tinggi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.273.461.032	3.711.995.669	13	Sangat Rendah
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9.963.716.354	3.717.196.529	37	Sedang
31	Inspektorat	20.072.822.753	8.596.984.149	43	Tinggi
32	Kecamatan Praya	22.961.502.581	8.429.315.930	37	Sedang
33	Kecamatan Praya Tengah	8.603.580.517	2.033.275.580	24	Sangat Rendah
34	Kecamatan Praya Barat	3.041.005.347	950.223.662	31	Rendah
35	Kecamatan Praya Barat Daya	2.753.028.576	1.116.546.193	41	Tinggi
36	Kecamatan Praya Timur	2.853.721.227	422.635.035	15	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi	%	Predikat Keuangan
37	Kecamatan Pujut	3.499.050.016	833.076.121	24	Sangat Rendah
38	Kecamatan Janapria	3.218.630.097	702.444.705	22	Sangat Rendah
39	Kecamatan Kopang	3.445.909.778	1.623.143.796	47	Sangat Tinggi
40	Kecamatan Batukliang	2.210.260.509	1.310.610.558	59	Sangat Tinggi
41	Kecamatan Batukliang Utara	2.680.405.629	649.790.651	24	Sangat Rendah
42	Kecamatan Pringgarata	3.139.266.124	1.647.787.109	52	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Jonggat	3.404.626.039	1.511.110.309	44	Tinggi
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7.760.853.221	2.889.012.557	37	Sedang
45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.625.291.485	2.052.247.035	21	Sangat Rendah

2.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD, RKPD dan APBD, dapat dilakukan analisis bahwa terdapat perbedaan antara target kinerja RKPD dengan RPJMD (belum sinkron dan konsisten) serta terdapat kegiatan yang tidak direncanakan akan tetapi dianggarkan dalam mekanisme APBD dan kadang kurang sinkron dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Analisis dilakukan terhadap capaian pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I yang mencakup hasil keseluruhan Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan meliputi: (1) Realisasi Anggaran, dan (2) Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- a) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- c) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Agar penentuan kriteria sebagaimana di atas dapat diaplikasikan pada data kondisi Semester I, maka dilakukan penyederhanaan kriteria dengan menggunakan setengah dari nilai interval yang ditentukan sehingga dalam penyusunan laporan triwulan II ini digunakan kriteria dan interval nilai realiasi kinerja sebagai berikut :

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
46% ≤ 100%	Sangat tinggi
37,6% ≤ 45%	Tinggi
32,6% ≤ 37,5%	Sedang
26% ≤ 32,5%	Rendah
≤ 25%	Sangat Rendah

Dalam menentukan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah, dilakukan penilaian terhadap capaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam *output* kegiatan. Realisasi *output* kegiatan dibandingkan terhadap rencana output kegiatan dalam DPA kemudian dikalikan bilangan 100 untuk melihat persentase capaian. Selanjutnya untuk mengukur capaian kinerja program, nilai capaian kegiatan tersebut dirata-ratakan, dengan persamaan sebagai berikut:

$$C_{\text{Program}} = \frac{\sum Z_n}{n}$$

dimana:

C_{Program} = Capaian kinerja Program

Z = capaian indikator kinerja output kegiatan

N = jumlah kegiatan dalam satu program

Dari hasil persamaan di atas kemudian di **kategorikan** ke dalam 5 (lima) kelas pencapaian dengan interval kelas sebagaimana interval nilai realisasi kinerja keuangan sebelumnya.

Berdasarkan capaian kinerja yang diraih oleh perangkat daerah dalam memenuhi target indikator di tahun 2025, sampai dengan Semester II dari 45 perangkat daerah seluruhnya memperoleh predikat yang cukup variatif sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2. Sedangkan realisasi kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana terlampir dalam lampiran. Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai Triwulan II sebagaimana table 2.3.

Tabel 2. 2 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator (%)	Predikat Kinerja
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	40	Tinggi
2	Dinas Kesehatan	13	Sangat Rendah
3	Rumah Sakit Umum Daerah	44	Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20	Sangat Rendah
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator (%)	Predikat Kinerja
6	Satuan Polisi Pamong Praja	56	Sangat Tinggi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	Sangat Rendah
8	Dinas Sosial	49	Sangat Tinggi
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16	Sangat Rendah
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	34	Sedang
11	Dinas Ketahanan Pangan	18	Sangat Rendah
12	Dinas Lingkungan Hidup	16	Sangat Rendah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	Sangat Rendah
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71	Sangat Tinggi
15	Dinas Perhubungan	73	Sangat Tinggi
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah	22	Sangat Rendah
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36	Sedang
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	5	Sangat Rendah
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	32	Rendah
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	24	Sangat Rendah
22	Dinas Pariwisata	14	Sangat Rendah
23	Dinas Pertanian	33	Sedang
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47	Sangat Tinggi
25	Sekretaris Daerah	16	Sangat Rendah
26	Sekretariat DPRD	15	Sangat Rendah
27	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	35	Sedang
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	41	Tinggi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	21	Sangat Rendah
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	40	Tinggi

No	Perangkat Daerah	Rata-rata Indikator (%)	Predikat Kinerja
31	Inspektorat	25	Sangat Rendah
32	Kecamatan Praya	40	Tinggi
33	Kecamatan Praya Tengah	12	Sangat Rendah
34	Kecamatan Praya Barat	82	Sangat Tinggi
35	Kecamatan Praya Barat Daya	34	Sedang
36	Kecamatan Praya Timur	11	Sangat Rendah
37	Kecamatan Pujut	13	Sangat Rendah
38	Kecamatan Janapria	22	Sangat Rendah
39	Kecamatan Kopang	44	Tinggi
40	Kecamatan Batukliang	40	Tinggi
41	Kecamatan Batukliang Utara	39	Tinggi
42	Kecamatan Pringgarata	67	Sangat Tinggi
43	Kecamatan Jonggat	78	Sangat Tinggi
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	10	Sangat Rendah
45	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	Sangat Rendah

2.3. Faktor Pendorong dan penghambat Kinerja Perangkat Daerah

Faktor pendorong Pencapaian Kinerja Pembangunan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal.
2. Adanya aplikasi SIPD membantu dalam hal perencanaan serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran daerah.
3. Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesuai target yang ada.

Sedangkan Adapun Faktor Penghambat pencapaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran kas setiap bulannya sehingga terdapat beberapa sub kegiatan yang menganggarkan kurang ataupun melebihi kebutuhankinerjanya untuk triwulan tersebut.
2. Belum tercapainya efisiensi dan efektifitas didalam pelaksanaan program kegiatan.
3. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran kas setiap bulannya.
4. Mundurnya pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu penjadwalan ulang.

5. Proses pelaksanaan pekerjaan di beberapa Perangkat Daerah terlambat dimulai dikarenakan adanya perubahan nomenkelatur/regulasi termasuk perubahan kebijakan alokasi DBHCHT.
6. Sumber pendanaan khususnya dari DAK Fisik mengalami perubahan (pengurangan pagu) yang cukup signifikan sehingga berdampak pada pencapaian target kinerja di beberapa Perangkat Daerah.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RPJMD/RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang belum dapat diantisipasi. Dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pendidikan kabupaten Lombok Tengah.
2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal.
3. Masih terdapat RTLH yang belum tertangani.
4. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan masih perlu ditingkatkan agar umur jalan sesuai dengan umur teknis.
5. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja.
6. Pengembangan Daya Tarik wisata belum optimal untuk memberikan alternatif Pembangunan ekonomi daerah.
7. Masih tingginya angka kemiskinan.



3

**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

PERUBAHAN RKPD 2025

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menggambarkan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024; perkiraan keuangan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah; arah kebijakan keuangan daerah; kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

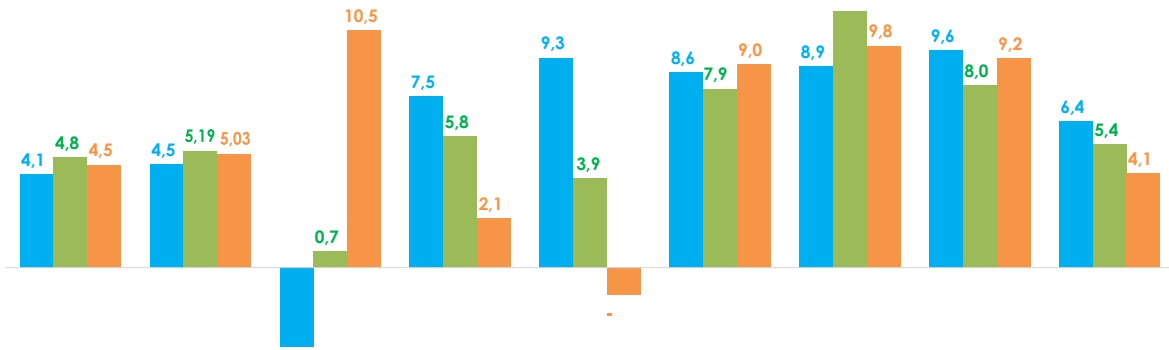
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Untuk mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target 2024

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.

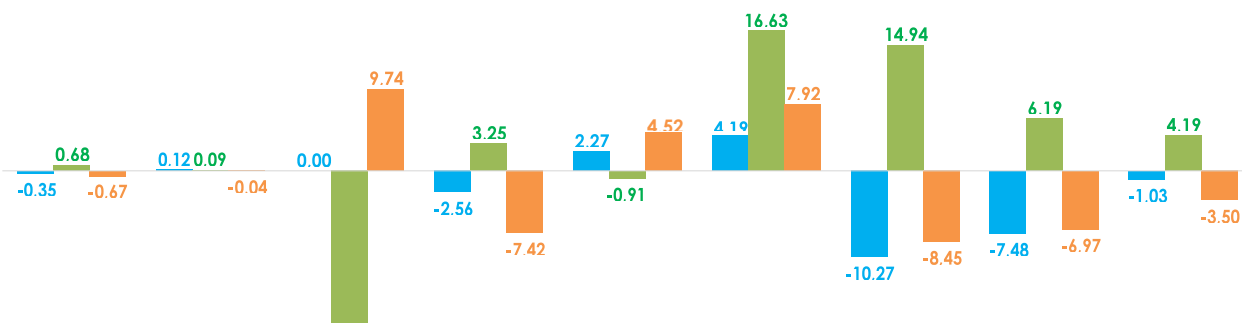


Gambar 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen; Konstruksi sebesar 9,84 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,96 persen.

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (Q-to-Q)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi terdalam terjadi pada Jasa Pendidikan sebesar 8,45 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,42 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,97 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,74 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,92 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,52 persen.



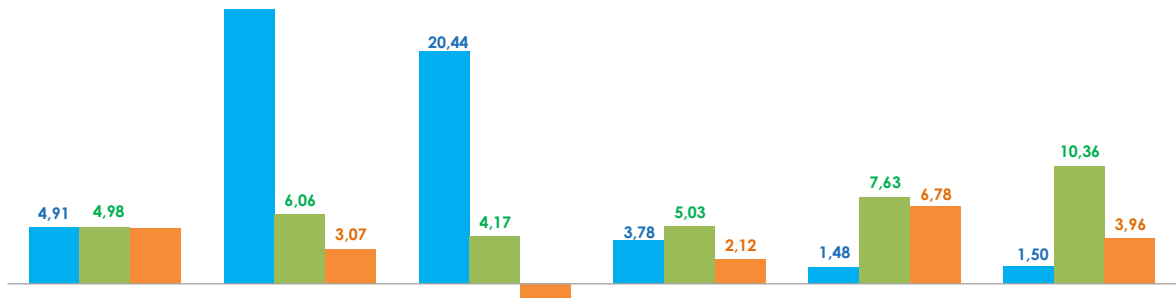
Gambar 2. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

PDB Menurut Pengeluaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

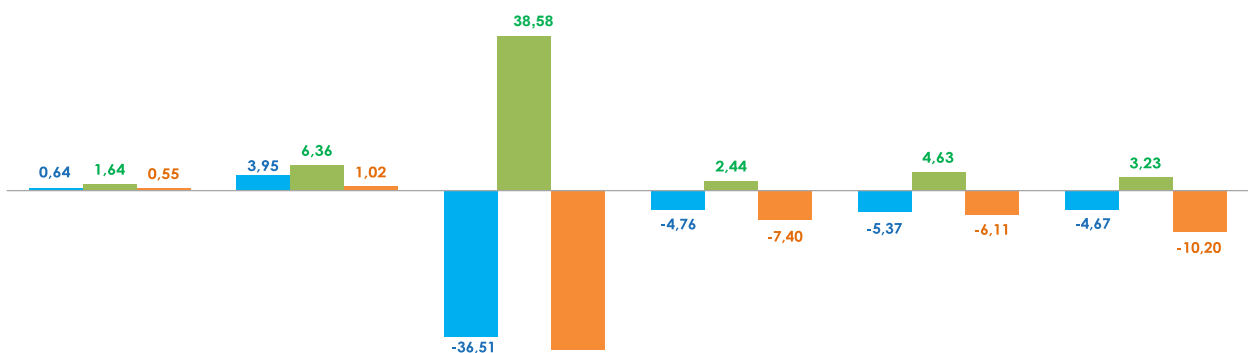
sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen.



Gambar 3. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,53 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,03 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,30 persen; Komponen PK-P sebesar 5,88 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 3,09 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB Pengeluaran memiliki peran sebesar 19,74 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (Q-to-Q)
 Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen, kecuali Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 1,02 persen dan Komponen PK-RT yang tumbuh sebesar 0,55 persen. Sementara itu, kontraksi terdalam terjadi pada Komponen PK-P sebesar 39,89 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 7,40 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,11 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang juga berkontraksi sebesar 10,20 persen.



Gambar 4. Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.1.2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

3.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2025 dibanding Triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 1,47 persen. Kontraksi terjadi pada 2 (dua) lapangan usaha sedangkan 15 (lima belas) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian menurun sebesar 30.14 persen dan Konstruksi menurun sebesar 1.52 persen. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 24.89persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 11.66 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 10.28 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 6.96 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5.24 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 4.84 persen; Jasa lainnya tumbuh sebesar 3.54 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 3.41 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 3.17 persen; Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 2.94 persen; Real Estate tumbuh sebesar 2.73 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 2.54 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 2.39 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 1.95 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 0.84 persen.

Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I-2025 secara umum masih sama dengan periode sebelumnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23.24 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 16.00 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14.76 persen; dan Konstruksi sebesar 9.30 persen.

3.1.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

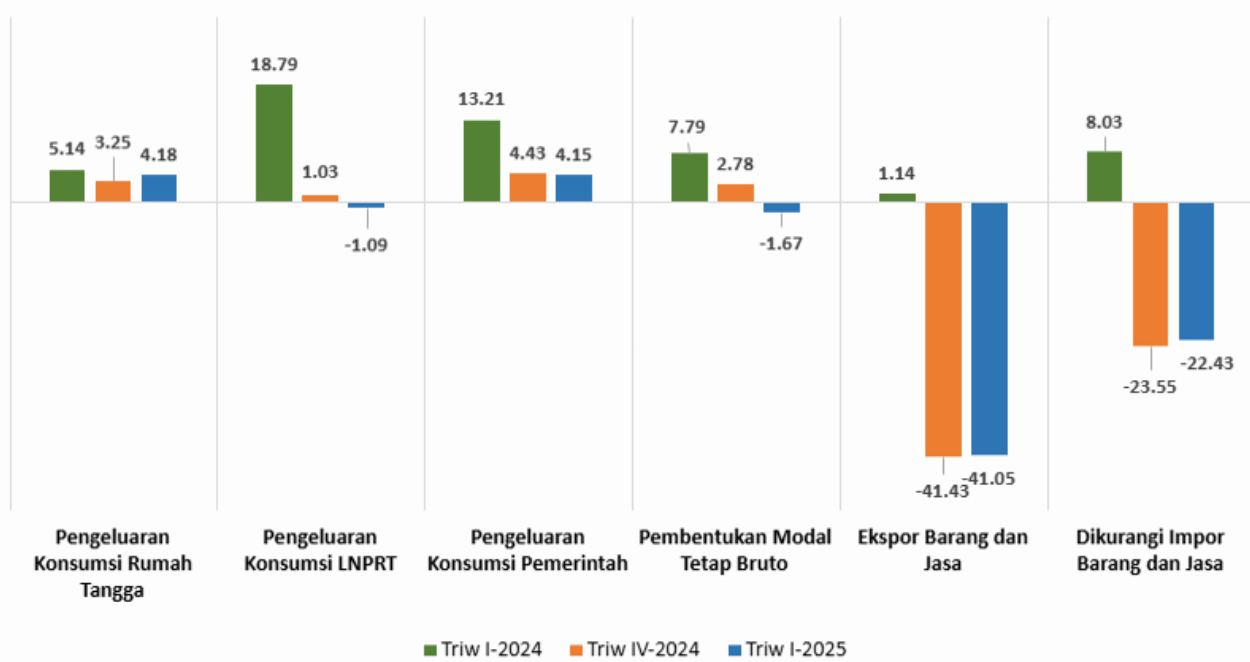
Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2025 dibanding Triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 2,32 persen. Kontraksi terjadi pada 12 (dua belas) lapangan usaha sedangkan 5 (lima) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 18.93 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8.63 persen; Konstruksi sebesar 6.51 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5.36 persen; Jasa lainnya sebesar 5.30 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4.30 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3.49 persen; Jasa Pendidikan sebesar 2.83 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2.56 persen; Real Estate sebesar 1.08 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 0.37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0.24 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan di antaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 13.28 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 5.55 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 1.65 persen; Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1.60 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 0.19 persen.

3.1.2.2. PDRB Menurut Pengeluaran

3.1.2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2025 Terhadap Triwulan I-2024 (Y-on-Y)

Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 1,47 persen. Kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 41,05 persen; diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami kontraksi sebesar 1,67, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) mengalami kontraksi sebesar 1,09 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi faktor pengurang juga mengalami kontraksi sebesar 22,43 persen.

Struktur PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I-2025 serupa dengan periode sebelumnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 61,28 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 36,11 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 29,68 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 14,06 persen; Komponen perubahan Inventori sebesar 1,90 persen; dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 1,75 persen. Adapun komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi faktor pengurang dalam PDRB memiliki share sebesar 44,79 persen.

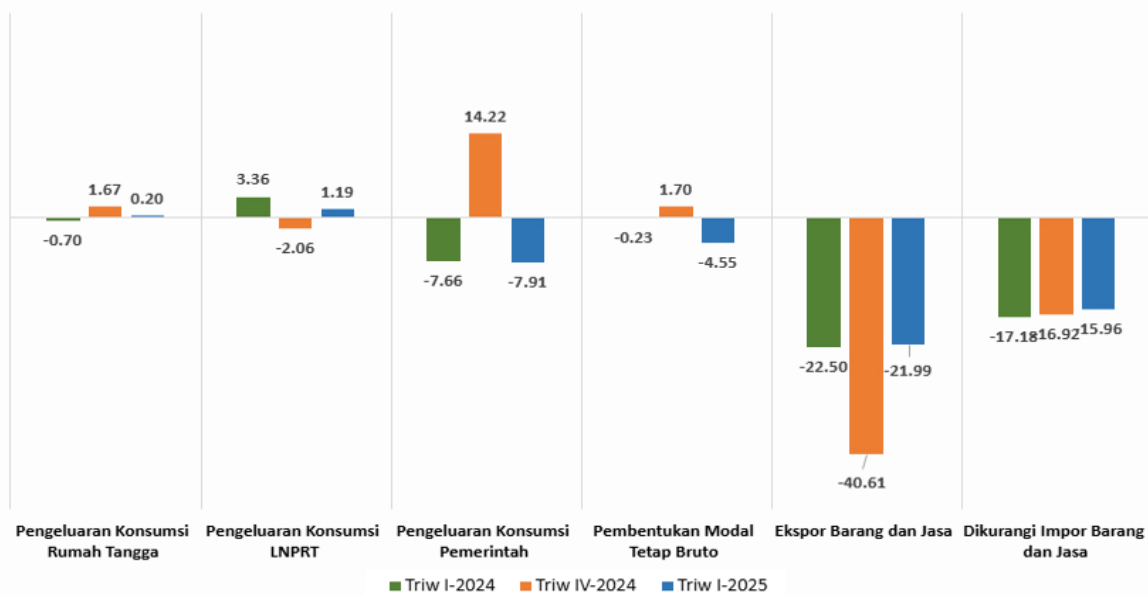


Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen)

3.1.2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I -2025 Terhadap Triwulan IV-2024 (Q-

to-Q)

Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan I-2025 dibanding Triwulan IV- 2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sedalam 2,32 persen (q-to-q). Kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sedalam 21,99 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sedalam 7,91 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sedalam 4,55 persen. Sedangkan komponen yang mengalami pertumbuhan adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,19 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,20 persen. Adapun Komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi faktor pengurang mengalami kontraksi sebesar 15,96 persen.



Gambar 6. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (Q-to-Q) (persen)

3.1.3. Kondisi Perekonomi Daerah Tahun 2024

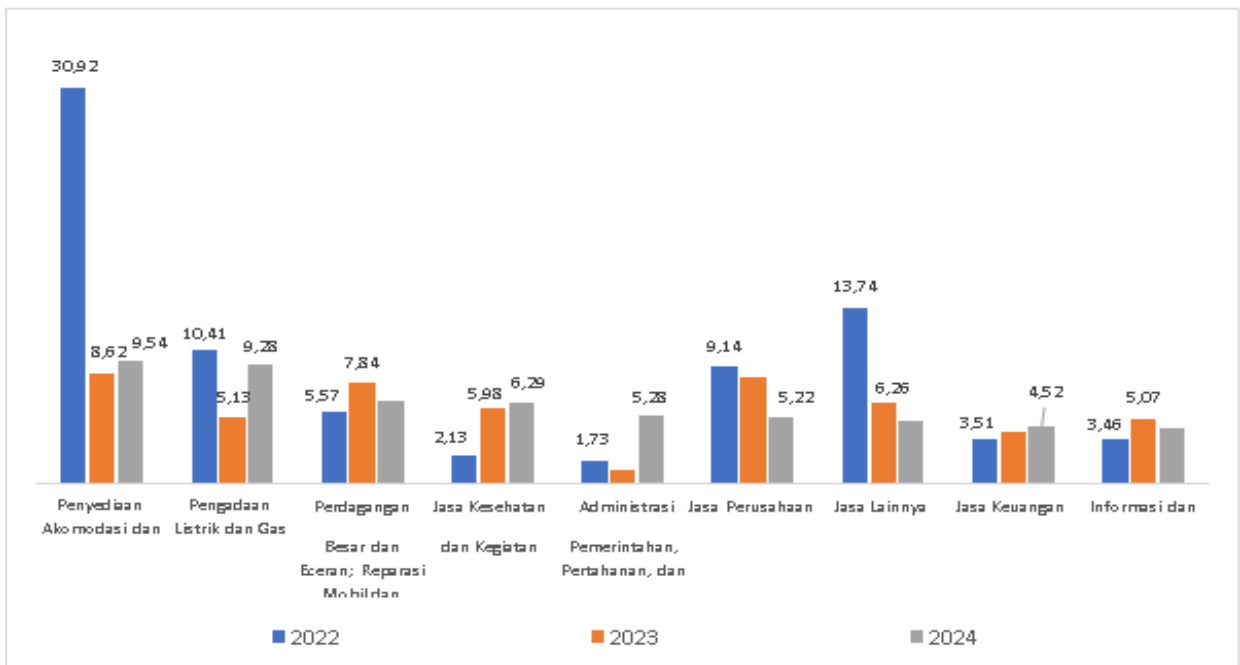
Beberapa hal yang terkait dengan kondisi ekonomi tahun 2025 adalah pengembangan kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya maupun variabel yang melingkupinya yang diuraikan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto

A. Pertumbuhan Ekonomi

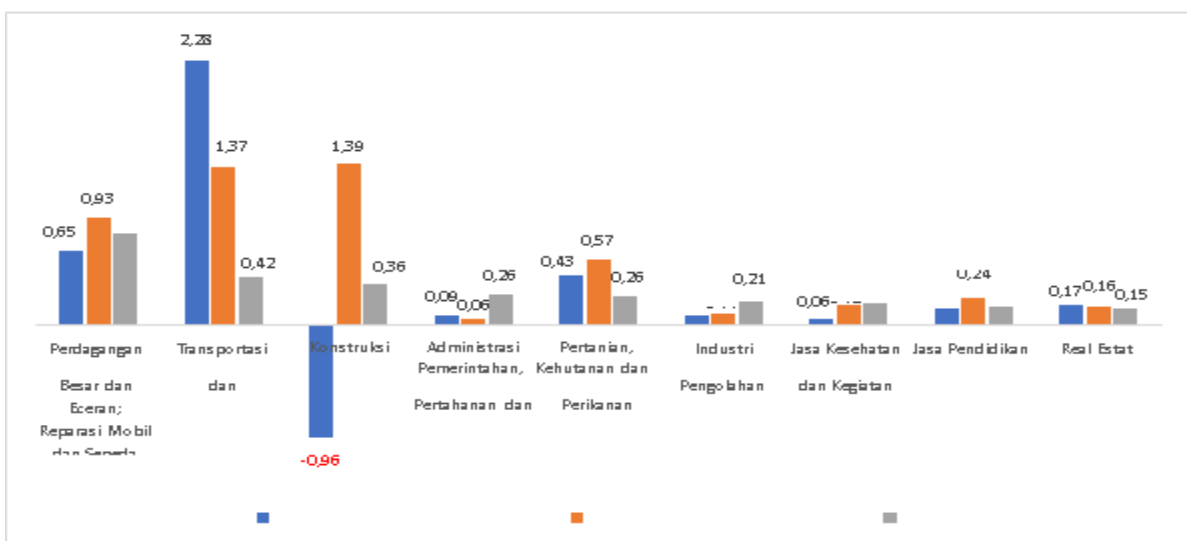
Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen, pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami kontraksi sebesar -0,49 persen. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2024 mencapai 9,54 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,28 persen. Sementara, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian yang memiliki peran paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,04 persen. Selain itu, beberapa lapangan usaha yang tumbuh diatas 5 persen adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,28 persen; Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,51 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,29 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,28 persen.



Gambar 7. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah beberapa Lapangan Usaha, 2022 -2024 (persen)

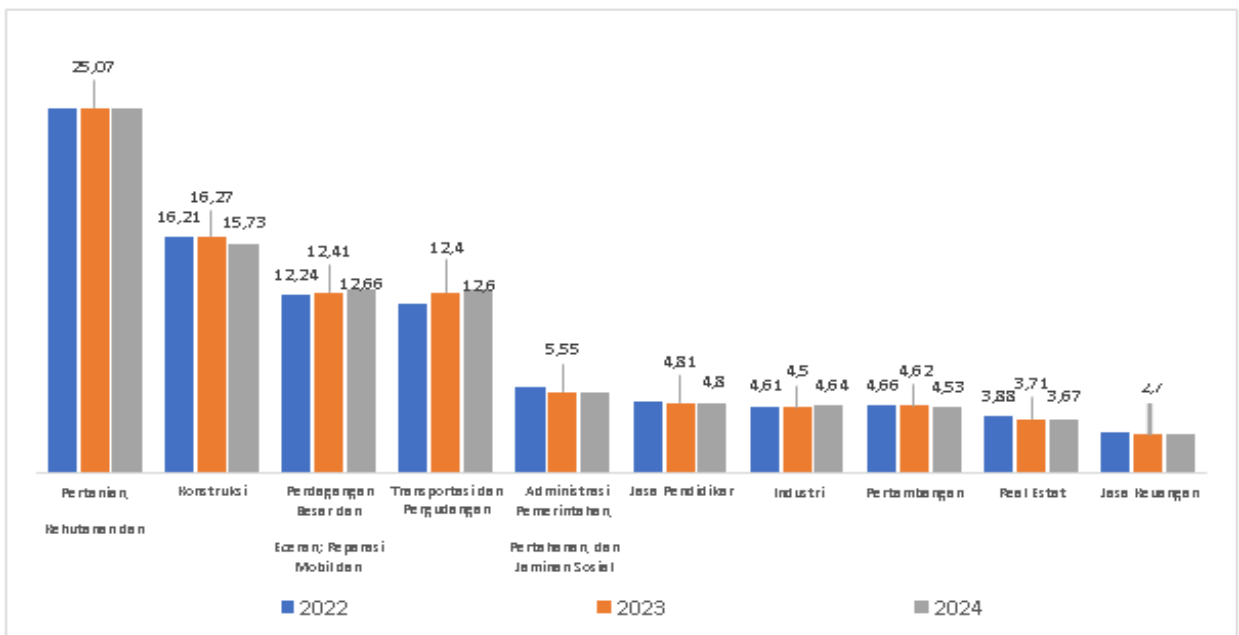
Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 dari sisi produksi tertinggi berasal lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,79 persen, dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,42 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Jasa Perusahaan menghasilkan sumber pertumbuhan terendah yaitu masing-masing sebesar -0,001 persen dan 0,008 persen.



Gambar 8. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah dari beberapa Lapangan Usaha, 2022-2024 (persen)

B. Struktur Ekonomi Tahun 2024

Struktur PDRB Kabupaten Lombok Tengah menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,01 persen, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,73 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,66 persen serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,6 persen. Sementara itu, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas memiliki peranan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar 0,08 persen.



Gambar 9. Struktur Ekonomi sisi produksi Kabupaten Lombok Tengah, 2022-2024 (persen)

2. Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2022-2024 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	P1	P2
			(Indeks Kedalaman)	(Indeks Keparahan)
2022	128,000	12,89	2,01	0,44
2023	129,740	12,93	2,12	0,52
2024	122,320	12,07	1,56	0,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Lombok Tengah, 2025

Penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah sebesar 0,51% dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Indikator kemiskinan lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik.

Tabel 3.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah 2022-2024

Tahun	Garis Kemiskinan
2022	480,657
2023	520,852
2024	549.500

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Lombok Tengah, 2025

3.1.4. Perkiraan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional dan adanya pertumbuhan positif di tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan menggali pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun 2024. Perubahan target pembangunan daerah yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perubahan Target Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Realisasi		Proyeksi/Target 2025	
			2023	2024	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Angka Kemiskinan	%	12,93	12,07	11,98 – 12,31	11,62
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,78	2,55	2,57 – 2,63	2,15
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,77	3,34	4,50 – 6,00	4,35
4	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp. Juta	19,50	20,37	20,45	20,45
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,41	71,19	71,23	71,97
6	Indeks Rasio Gini	Poin	0,313	0,343	0,343 - 0,328	0,343
7	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	%			-	12,76
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%			-	3,28
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	67,18		-	71,9

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka Keuangan Daerah memuat gambaran kondisi keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD dan non APBD untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan keuangan daerah dapat mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan perubahan RKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil *audited* hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Lombok Tengah sehingga RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (pajak daerah, hasil retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Bagi hasil pajak/bukan pajak dan DanaAlokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya). Setiap kelompok pendapatan tersebut, kemudian dirinci kembali dalam jenis pendapatan.

Bila dicermati secara keseluruhan pendapatan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 39.902.102.213.50,- dari APBD murni 2025, angka tersebut bersumber pada penyesuaian pendapatan dari anggaran DAK Fisik dan penyesuaian pendapatan dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2025 dan Perubahan Proyeeksi RKPD Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi 2022	Relisasi 2023	Relisasi 2024	Proyeksi/Target 2025		
					APBD 2025	Perubahan RKPD	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	238,785,324,104.33	274,112,885,092.99	331,059,847,831.25	438,891,965,919	471,469,325,705.50	32,577,359,786.50
4.1.01	Pajak Daerah	117,205,990,172.47	147,240,146,529.07	182,328,157,865.50	255,589,622,349	265,589,622,349	10,000,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	19,717,996,242.37	20,820,541,076.85	31,058,523,271	166,909,227,223	189,486,587,009.50	22,577,359,787
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,135,132,382	11,824,141,617	12,741,149,852	12,617,716,347	12,617,716,347	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92,726,205,307.49	94,228,055,870.07	104,932,016,842.75	3,775,400,000	3,775,400,000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,934,225,978,231	1,972,976,082,091.00	2,289,284,360,966	2,334,375,424,869	2,275,868,154,869	(58,507,270,000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,827,418,235,150	1,853,774,800,135	2,165,107,290,050	2,232,850,666,000	2,174,343,396,000	(58,507,270,000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106,807,743,081	119,201,281,956	124,177,070,916	101,524,758,869	101,524,758,869	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37,170,639,657	31,210,802,114	109,315,906,788	39,827,328,000	25,855,136,000	(13,972,192,000)
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,622,787,559	700,863,693	266,910,500	302,000,000	302,000,000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27,547,852,098	30,509,938,421	109,048,996,288	39,525,328,000	25,553,136,000	(13,972,192,000)
Jumlah Pendapatan		2,210,181,941,992.33	2,278,299,769,297.99	2,729,660,115,585.25	2,813,094,718,788	2,773,192,616,574.50	(39.902.102.213.50)

Sumber: Bapperida dan BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Pada Perubahan RKPD 2025 belanja diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, menguatkan Asta Cita, penurunan stunting dan pelayanan SPM serta memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif. Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi/Target 2025		
					APBD 2025	Perubahan RKPD	Selisih
5	BELANJA						
51	BELANJA OPERASI	1,620,124,451,870.38	1,683,457,039,797.23	1,978,538,947,668.32	2,098,727,411,778.84	2,152,151,966,056.61	53,424,554,278
5101	Belanja Pegawai	992,749,170,142.00	1,028,819,909,685.20	1,156,476,918,161.76	1,274,077,172,610.62	1,306,929,986,518.79	32,852,813,908.17
5102	Belanja Barang dan Jasa	565,269,915,003.38	560,356,950,091.03	715,146,946,996.56	751,786,994,475.22	772,358,734,844.82	20,571,740,369.60
5103	Belanja Bunga	5,832,378,429	12,111,886,019	11,302,707,488	9,449,712,191.00	9,449,712,191.00	0.00
5105	Belanja Hibah	45,364,988,296	81,628,294,002	95,072,375,022	62,657,532,502.00	62,657,532,502.00	0.00
5106	Belanja Bantuan Sosial	10,908,000,000	540,000,000	540,000,000	756,000,000.00	756,000,000.00	0.00
52	BELANJA MODAL	385,171,625,121.59	236,112,590,581	283,920,793,925.66	310,020,899,876	333,453,213,823	23,432,313,947
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	9,818,545,946.00	14,359,344,815	8,838,353,947.00	13,700,285,175	19,541,587,913	5,841,302,738
54	BELANJA TRANSFER	349,417,931,272.00	327,262,013,855	346,298,032,584.00	359,465,424,619	367,256,254,586	7,790,829,967
5401	Belanja Bagi Hasil	5,710,867,350	12,045,737,949	20,838,360,124	26,998,882,059	33,839,712,026	6,840,829,967
5402	Belanja Bantuan Keuangan	343,707,063,922	315,216,275,906	325,459,672,460	332,466,542,560	333,416,542,560	950,000,000
Jumlah Belanja		2,364,532,554,209.97	2,261,190,989,048.23	2,617,596,128,124.98	2,781,914,021,449	2,872,403,022,378	90,489,000,929
Total Surplus/(Defisit)		-154,350,612,217.64	17,108,780,249.76	112,063,987,460.27	31,180,697,340	99,210,405,804	68,029,708,464

Sumber: Bapperida dan BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2024 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp. 135,342,439,043.76 dari penghematan belanja.

Adapun realisasi pembiayaan Tahun 2022-2025 serta proyeksi kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi/Target RKPD 2025		
					APBD 2025	Perubahan RKPD	Selisih
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28,993,291,635.99	41,854,120,219.73	39,084,647,243.49	0	135,341,420,443.76	135,341,420,443.76
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	187,084,169,050.00	0	4,950,317,300.00	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			29,600,000.00			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	216,077,460,685.99	41,854,120,219.73	44,064,564,543.49	0	135,341,420,443.76	135,341,420,443.76
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					4,950,317,300	4,950,317,300
	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	19,901,253,248.00	19,901,253,226.00	20,787,131,560.00	31,180,697,340	31,180,697,340	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19,901,253,248.00	19,901,253,226.00	20,787,131,560.00	31,180,697,340	36,131,014,640	4,950,317,300
	Pembiayaan Netto	196,176,207,437.99	21,952,866,993.73	135,341,420,443.76	(31,180,697,340)	99,210,405,803.76	68,029,708,463.76

Sumber : Bapperida dan BKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2025



4

**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**
PERUBAHAN RKPD 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD, dengan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2021–2026 yaitu : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**.

Makna dari visi tersebut adalah:

- a. Beriman merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- b. Sejahtera menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- c. Bermutu merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- d. Maju memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- e. Berbudaya dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok).

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri.
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien.
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.
Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi sampai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Penjabaran Misi dalam RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat
		Meningkatnya moderasi beragama
Misi 2: Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul	Meningkatnya kualitas SDM	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Misi 3: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Misi 4: Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial
		Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
		Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten
		Meningkatnya akses air minum aman
		Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman
		Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH
		Meningkatnya ketahanan bencana
Misi 5: Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya

4.2 **Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

Tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 mengacu dan memperhatikan Konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tema pembangunan dalam RKPD tahun 2025 adalah: **“Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemandirian Ekonomi, Daya Saing Daerah Didukung Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas”** yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan kebudayaan daerah
- 2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia
- 3) Pengentasan Kemiskinan
- 4) Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing
- 5) Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas
- 6) Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi
- 7) Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah

Penetapan tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2025 adalah sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025.

4.2.1 **Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 merupakan tahapan pertama RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan Tahap Perkuatan Fondasi Transformasi. Adapun Transformasi Indonesia dan Landasan transformasi untuk tahap pertama RPJPN adalah sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social
2. Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Sosial**

- a. Kesehatan untuk Semua Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
 - 2) Investasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas, Pustu, dan UKBM
 - 3) Penurunan kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal dan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif

- 4) Pengendalian penyakit menular terutama TB dan eliminasi penyakit tropis terabaikan terutama kusta dan Schistosomiasis
- 5) Penguatan pembiayaan kesehatan dan JKN.
- b. Pendidikan Berkualitas yang Merata Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
 - 2) Restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru untuk mendorong pemerataan dan kualitas Pendidikan
 - 3) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang berkualitas
 - 4) Peningkatan lulusan pendidikan menengah dan tinggi (STEAM) yang produktif dan berdaya saing
- c. Perlindungan Sosial yang Adaptif Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek
 - 2) Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat
 - 3) Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan
 - 4) Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan

2. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Ekonomi

- a. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Produktivitas Ekonomi Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Penguatan hilirisasi industri berbasis SDA (a.l nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)
 - 2) Peningkatan industri padat teknologi dan inovasi (logam dasar; kimia dasar; elektronik dan digital; kimia hilir dan farmasi; alat angkut; serta kedirgantaraan)
 - 3) Pengembangan ekonomi biru indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru
 - 4) Pengembangan bioekonomi dan bioteknologi
 - 5) Pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, regeneratif bali dan klaster pariwisata IKN (a.l Danau Toba, Borobudur, Lombok Gili Tramen, Manado-likupang, Bangka Belitung, Wakatobi, BTS, Raja Ampat, Morotai, Bali, dan IKN)
 - 6) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (seni, budaya, dan kerajinan; film, animasi, dan visual arts; kuliner; serta aplikasi dan gim)
 - 7) Pengembangan industrialisasi perikanan dan kelautan
 - 8) Pengembangan koperasi sektor produksi
 - 9) Peningkatan peran UMKM dalam rantai nilai industri
 - 10) Pengembangan wirausaha berorientasi tumbuh
 - 11) Penguatan vokasi sesuai dunia usaha
 - 12) Peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
 - 13) Penciptaan ekosistem dan peningkatan anggaran iptek serta inovasi
- b. Penerapan Ekonomi Hijau Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Penerapan ekonomi sirkular
 - 2) Percepatan transisi energi
 - 3) Penerapan transportasi hijau
- c. Transformasi Digital Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Pengembangan superplatform digital indonesia
 - 2) Peningkatan kualitas infrastruktur TIK

- 3) Penciptaan enabler transformasi digital
- 4) Penguatan SDM digital
- 5) Peningkatan adopsi teknologi digital pada berbagai sektor
- d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi
 - 2) Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru
 - 3) Penguatan logistik nasional
 - 4) Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara
 - 5) Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antardaerah dan dengan global
 - 6) Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
 - 7) Peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global
 - 8) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global
- e. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Peningkatan kualitas 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado)
 - 2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
 - 3) Pengentasan rumah tidak layak huni
 - 4) Pembiayaan perumahan untuk semua
 - 5) Pengentasan permukiman kumuh
 - 6) Penyediaan perumahan publik terjangkau
3. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Tata Kelola Prioritas pembangunan untuk transformasi Tata Kelola adalah Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, dengan beberapa intervensi yang menjadi penekanan adalah:
 - 1) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi nasional dan penyederhanaan tata kelola regulasi;
 - 2) Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN;
 - 3) Penataan proses bisnis dan kelembagaan KL berdasarkan Prioritas Nasional/ *shared outcome* (manajemen kinerja, manajemen anggaran, Manajemen resiko, dan sistem insentif KL atas pencapaian target);
 - 4) Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan sistem GRC/ Governance, Risk and Compliance);
 - 5) Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun;
 - 6) Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi dan penerapan Sistem Integritas Partai Politik
4. Prioritas Pembangunan untuk Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - a. Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) *Single prosecution system* melalui penguatan kewenangan kejaksaan, kapasitas jaksa, dan pemenuhan sarana prasarana penanganan perkara
 - 2) Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri, keamanan insani, keamanan laut, dan keamanan siber

- 3) Penguatan kebebasan sipil yang berwawasan Pancasila, penguatan kesetaraan kelompok rentan untuk akses informasi dan keterwakilan politik, serta penguatan kapasitas, fungsi, dan integritas Lembaga demokrasi
 - b. Stabilitas Ekonomi Makro
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Reformasi perpajakan (penambahan kelembagaan administrasi perpajakan)
 - 2) Reformasi subsidi, terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran
 - 3) Transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
 - 4) Pengendalian inflasi dengan fokus penyelesaian masalah struktural (pasokan dan distribusi), penguatan data, serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi pusat & daerah
 - 5) Peningkatan kontribusi keuangan syariah dan inklusi keuangan
 - c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Peningkatan efektivitas kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global
 - 2) Penguatan kerja sama pembangunan internasional dan diplomasi ekonomi
 - 3) Pemenuhan infrastruktur penopang kebijakan luar negeri
 - 4) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
 - 5) Peningkatan kemampuan pertahanan
- 5. Prioritas Pembangunan untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**
- a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya
 - 2) Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
 - 3) Menjamin hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
 - 4) Penguatan moderasi beragama
 - 5) Transformasi penjaminan produk halal
 - 6) Pengembangan dana sosial keagamaan produktif
 - b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
 - 2) Penguatan institusi keluarga dalam penanaman nilai, moral, etika, integritas, karakter, dan pengembangan psikososial anak
 - 3) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
 - 4) Pengembangan masyarakat inklusif terhadap anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya
 - c. Lingkungan Hidup Berkualitas
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
 - 1) Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies
 - 2) Sistem Peringatan Dini Slow On Set LH dan peningkatan Kesehatan laut
 - 3) Perbaikan kualitas ekosistem dan LH
 - 4) Penegakan Hukum Lingkungan
 - 5) Pembangunan Forest dan Sponge City di Ibu Kota Nusantara

- 6) Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
 - 7) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju Circular Economy
- d. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
- 1) Menjamin ketahanan energi nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat penerimaan energi
 - 2) Meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional (Kawasan Sentra Produksi Pangan, pangan lokal, pangan akuatik/blue foods)
 - 3) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan (diversifikasi, keamanan, dan fortifikasi pangan)
 - 4) Penguatan tata kelola pangan (susut dan limbah pangan, serta Satu Data Pangan)
 - 5) Pembangunan dan revitalisasi tampungan air alami dan buatan
 - 6) Penuntasan pemanfaatan air baku, irigasi, dan listrik dari bendungan terbangun
 - 7) Penyediaan air baku DKI Jakarta dari wilayah sungai di Banten dan Jawa Barat (Interbasin transfer)
 - 8) Rehabilitasi hutan dan lahan
 - 9) Pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan yang aman, berkelanjutan, serta berketahanan iklim dan bencana
- e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Beberapa intervensi yang menjadi penekanan untuk prioritas pembangunan tersebut adalah:
- 1) Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut
 - 2) Pencegahan penyakit menular akibat iklim
 - 3) Pertanian ramah iklim
 - 4) Pembangunan dan konservasi sumber daya air
 - 5) Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestic
 - 6) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
 - 7) Restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang)
 - 8) Peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini terpadu bencana
 - 9) Penguatan manajemen tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Indikator Pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan sebesar 20,8 %
2. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif sebesar 7,9%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 %;
4. Tingkat Inflasi sebesar $2,5 \pm 1,0$
5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,458
6. Persentase Penurunan Emisi GRK sebesar
 - a. Kumulatif 28,12 %
 - b. Tahunan 32,65 %
7. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0 %;

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2025

Tema pembangunan merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan pada rencana kerja pemerintah daerah yang tercermin dalam prioritas daerah dan indikator pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025.

Tema RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah **“Penguatan Industrialisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Dukungan Reformasi**

Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan”.

Tujuan utama Pembangunan provinsi NTB Tahun 2025 adalah memperkuat industrialisasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung reformasi birokrasi dan menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB. Tema ini bermakna bahwa pada tahun 2025 Provinsi NTB dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui:

- a. Penguatan industrialisasi
Makna dari penguatan industrialisasi adalah upaya untuk mengembangkan dan memperkuat sektor industri dan industri pengolahan di Provinsi NTB berbasis sumber daya alam lokal. Pengembangan yang dilakukan adalah mendorong pertumbuhan industri lokal yang mengoptimalkan sumber daya alam dan sdm local yang mampu memberikan nilai tambah produk lokal. Pengembangan industry local ini didukung oleh diversifikasi industri pada sektor strategis dan potensial di Provinsi NTB. Peningkatan investasi dengan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pengembangan industri lokal. Kebijakan insentif dan kemudahan perijinan menjadi kunci untuk meningkatkan investasi.
- b. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat
Makna dari peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi NTB melalui penanganan berbagai isu strategis daerah terkait penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, konvergensi, dan tingginya kasus perkawinan anak, peningkatan kualitas layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, energi kelistrikan, dan lainnya. Kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai dengan pemberdayaa ekonomi lokal dari UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Dukungan Reformasi birokrasi
Makna dari dukungan reformasi birokrasi adalah pengembangan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, perumusan kebijakan unggul untuk mendorong implementasi kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka implementasi, dan kerangka pendanaan yang lebih optimal. Hal ini didukung oleh digitalisassi pelayanan publik dengan mengoptimalkan teknologi, informasi, dan komunikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan publik, dan penyederhanaan proses birokrasi untuk proses perizinan dan pelayanan yang lebih berkualitas.
- d. Implementasi pembangunan berkelanjutan
Makna dari implementasi pembangunan berkelanjutan adalah perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 mengintegrasikan prinsipprinsip berkelanjutan dalam semua aspek pembangunan. Hal ini sangat signifikan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan upaya pelestarian lingkungan dan menjamin terlaksananya kesejahteraan sosial. Prinsip Pembangunan Rendah Karbon Dan Berketahanan Iklim (PRKBI) menjadi kunci implementasi untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB.

Selanjutnya penyelarasan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 dan RPJMD Teknokratik Provinsi NTB Tahun 2025-2029 untuk implementasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Kesesuaian RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dengan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025-2045 yaitu pengembangan

sektor industri dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tahap pertama tahun 2025-2029 yaitu penguatan fondasi transformasi pembangunan daerah. RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 ini juga mengintegrasikan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 untuk implementasi program dan kegiatan prioritas daerah yang mendukung tujuan jangka menengah.

Berdasarkan hasil penyelerasan ini maka tujuan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT), dan SDM yang berdaya saing dan produktif
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri, menerapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI)
4. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri;
5. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah (reformasi birokrasi);
6. Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
7. Terwujudnya peningkatan daya saing daerah;
8. Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas.

RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 ini juga diarahkan untuk mencapai target sasaran visi RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan tahun awal pelaksanaan Pembangunan jangka panjang 2025-2045 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa (KUAT) dan memiliki daya saing;
2. Peningkatan produktivitas ekonomidaerah dan pendapatan perkapita;
3. Peningkatan kerjasama daerah dengan dunia internasional dalam bidang investasi, perdagangan, ekspor dan akselerasi daya saing daerah;
4. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
5. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission.

Indikator Pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,0-6,05 %
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 11,68-12,18%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,17-2,79%
4. Indeks Modal Manusia sebesar 0,54 indeks Poin
5. Rasio Gini sebesar 0,369-0,373 Poin
6. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 25,99%

Untuk selanjutnya keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 3 Keselarasan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025

PD dalam RPD 2024-2026	PN dalam RKP 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025
PD 1	PN 1	P 1
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (PN 2)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (PD 2)	<i>Productivity PN 2, PN 3, dan PN 6</i>
PD 2	PN 2	P 2

PD dalam RPD 2024-2026	PN dalam RKP 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025
Pembangunan Manusia (PN 1), (PN 4)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PD 1)	<i>People PN1 dan PN 4</i>
PD 3	PN 3	P 3
Pembangunan Lingkungan (PN 5), (PN 8)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PD 4)	<i>Planet PN 2, PN 3, PN 5, dan PN 6</i>
PD 4	PN 4	P 4
Pembangunan Kesejahteraan (PN 3)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (PD 2), (PD 6)	<i>Power PN 7</i>
PD 5	PN 5	P 5
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PN 7)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PD 3)	<i>Prosperity PN 6 dan PN 8</i>
PD 6	PN 6	
Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PN 4)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PD 7)	
PD 7	PN 7	

PD dalam RPD 2024-2026	PN dalam RKP 2025	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025
Peningkatan Daya saing Daerah (PN 6)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba (PD 5)	
	PN 8	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (PD 3)	

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi NTB, dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah dan dapat memenuhi target-target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan 2025

Prioritas Daerah 2025	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penyakit masyarakat tertangani	Persen	100
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase konflik berlatar belakang agama tertangani	Persen	100
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krama adat aktif	Persen	80
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	IPM	Poin	71.23
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.606

Prioritas Daerah 2025	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.729
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.57 – 2.63
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	20,40
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3.53
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	3.75
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1.46
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	71.05
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	93.248
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	68.6
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	79.78
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/tahun	765.37

Prioritas Daerah 2025	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	61,10
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Cakupan layanan persampahan	Persen	30.3
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,95
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B
Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah (PD7)	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	95

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema/agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJPD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah yang berisi program atau gabungan program prioritas.

4.2.4 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Berikut disajikan arah kebijakan pada tujuh prioritas pembangunan tahun 2025.

Tabel 4.5. Penjabaran Prioritas Daerah dalam Arah Kebijakan Pembangunan

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Koordinasi, kerjasama dan perumusan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
		Penegakan peraturan daerah
		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya
		Pencegahan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya moderasi beragama	Pelibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Penanaman nilai budaya luhur
		Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
		Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan
		Pemenuhan SPM Pendidikan
		Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pendidikan
		Meningkatkan minat baca
		Pengembangan mitra perpustakaan
		Pengembangan pemuda dan atlit berprestasi
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Pemenuhan SPM Kesehatan
		Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
		Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Menciptakan iklim ramah investasi
		Peningkatan cakupan perlindungan sosial masyarakat miskin
		Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
		Peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		Penguatan mutu bahan baku dan integrasi hulu hilir
		Penguatan pemanfaatan ekonomi digital
		Peningkatan akses pasar dan permodalan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Memperkuat citra kepariwisataan daerah melalui media promosi

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
		Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Peningkatan volume dan mutu produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Perlindungan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Penguatan ketersediaan, distribusi dan diversifikasi pangan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis
		Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi
		Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya akses air minum aman	Peningkatan dan perlindungan sumber air
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan kumuh
		Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
		Peningkatan kualitas dan cakupan sanitasi di kawasan kumuh
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup
		Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)
		Pengendalian pelaksanaan izin lingkungan
		Konservasi dan perlindungan mata air

Prioritas Daerah	Sasaran	Arah Kebijakan
		Penguatan tata kelola dan regulasi pengelolaan sampah menuju Lombok Tengah zero waste
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Meningkatnya ketahanan bencana	Penguatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana
		Pembentukan desa dan kelompok masyarakat tangguh bencana
		Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana
		Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana
		Penguatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan
		Penyediaan data dan informasi pembangunan
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Optimalisasi pendapatan daerah
		Peningkatan profesionalisme ASN
		Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
		Peningkatan sarana prasarana aparatur
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik
		Penyesuaian regulasi pelayanan publik
Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah (PD7)	Meningkatnya kualitas sistem inovasi daerah dalam kinerja pembangunan	Peningkatan kualitas penelitian dan inovasi daerah

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung prioritas nasional dan provinsi guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi. Berikut disajikan keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.6.

Tabel 4.6 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025

Tema RKP	Tema RKPD Provinsi NTB	Tema RKPD Kabupaten Lombok Tengah
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Industrialisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Dukungan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan	Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemandirian Ekonomi, Daya Saing Daerah Didukung Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pembangunan Kesejahteraan	Pengentasan Kemiskinan
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia

Tema RKP	Tema RKPD Provinsi NTB	Tema RKPD Kabupaten Lombok Tengah
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Industrialisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Dukungan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan	Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kemandirian Ekonomi, Daya Saing Daerah Didukung Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Daya saing Daerah	Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing
Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Daya saing Daerah	Pengentasan Kemiskinan
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Anta rumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pembangunan Lingkungan	Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Sementara itu sasaran pembangunan yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah (PD). Masing-masing Perangkat Daerah merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Sebagai implementasi prioritas dan arah penguatan program secara lebih terperinci, maka direncanakan beberapa program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.7 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Meningkatkan kehidupan beragama (PD1)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesbangpol
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesbangpol
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	[Program] 2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	[KEGIATAN] 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas DIKBUD
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas DIKBUD
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Dinas DIKBUD
Meningkatkan kehidupan beragama dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PD1)	[Program] 2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	[KEGIATAN] 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dinas DIKBUD

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas DIKBUD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas DIKBUD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas DIKBUD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas DIKBUD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	[KEGIATAN] 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan	Dinas DIKBUD

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
		Sekolah Menengah Pertama	
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	[KEGIATAN] 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas DIKBUD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	[Program] 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	[KEGIATAN] 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas DIKBUD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	[Program] 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	[KEGIATAN] 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas DIKBUD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	[Program] 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	[KEGIATAN] 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMD
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	[Program] 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dinas PMD
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	[KEGIATAN] 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	[KEGIATAN] 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	[KEGIATAN] 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	[KEGIATAN] 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas PERKIM

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	[KEGIATAN] 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.03 Program Kawasan Permukiman	[KEGIATAN] 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.03 Program Kawasan Permukiman	[KEGIATAN] 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.03 Program Kawasan Permukiman	[KEGIATAN] 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	[KEGIATAN] 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	[KEGIATAN] 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas PERKIM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	[KEGIATAN] 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	[KEGIATAN] 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	[KEGIATAN] 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	[KEGIATAN] 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	[KEGIATAN] 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	[KEGIATAN] 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 1.06.06 Program Penanganan Bencana	[KEGIATAN] 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	[KEGIATAN] 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	[KEGIATAN] 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	[KEGIATAN] 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	[KEGIATAN] 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	[KEGIATAN] 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.07.05 Program Hubungan Industrial	[KEGIATAN] 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.07.05 Program Hubungan Industrial	[KEGIATAN] 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 3.32.02 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	[KEGIATAN] 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	[KEGIATAN] 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas NAKERTRANS

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	[KEGIATAN] 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas NAKERTRANS
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	[KEGIATAN] 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	[KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	[KEGIATAN] 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	[KEGIATAN] 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	[KEGIATAN] 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	[KEGIATAN] 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas P3AP2KB

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	[KEGIATAN] 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	[KEGIATAN] 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas P3AP2KB
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	[KEGIATAN] 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas KETAPANG
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	[KEGIATAN] 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas KETAPANG
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	[KEGIATAN] 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas KETAPANG
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	[KEGIATAN] 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas KETAPANG
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	[KEGIATAN] 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas KETAPANG
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	[KEGIATAN] 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas KETAPANG
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	[KEGIATAN] 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Dinas UKM

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
		dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	[KEGIATAN] 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas UKM
Pengentasan Kemiskinan (PD3)	[Program] 2.17.08 Program Pengembangan Umkm	[KEGIATAN] 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas UKM
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	[KEGIATAN] 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	[KEGIATAN] 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	[KEGIATAN] 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	[KEGIATAN] 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	[KEGIATAN] 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	[KEGIATAN] 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Usaha Pertanian	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kelautan & Perikanan

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	[KEGIATAN] 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	[KEGIATAN] 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	[KEGIATAN] 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	[KEGIATAN] 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	[KEGIATAN] 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	[KEGIATAN] 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	[Program] 3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	[KEGIATAN] 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kelautan & Perikanan
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas NAKERTRANS
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas PERINDAGKOP

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PERINDAGKOP
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas UKM

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas UKM
Optimalisasi komoditas unggulan, Ekonomi kreatif dan daya saing (PD4)	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas UKM
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Dinas PUPR

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	[KEGIATAN] 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	[KEGIATAN] 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	[KEGIATAN] 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	[KEGIATAN] 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	[KEGIATAN] 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	[KEGIATAN] 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	[KEGIATAN] 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
	Dan Angkutan Jalan (Llaj)		
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1	Dinas Perhubungan

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	[KEGIATAN] 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	[KEGIATAN] 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	[KEGIATAN] 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	[KEGIATAN] 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	[KEGIATAN] 2.15.03.2.15 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	[Program] 2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	[KEGIATAN] 2.15.03.2.16 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Persampahan	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas (PD5)	Program Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas KOMINFO
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas KOMINFO
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas KOMINFO
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas KOMINFO
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	BKPP

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	BKPP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	BAPPERIDA
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan	BAPPERIDA

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
	Evaluasi Pembangunan Daerah	Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPERIDA
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	BAPPERIDA
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	BAPPERIDA
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PMPTSP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	[KEGIATAN] 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	[KEGIATAN] 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	[KEGIATAN] 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.03 Program Pencatatan Sipil	[KEGIATAN] 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.03 Program Pencatatan Sipil	[KEGIATAN] 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.03 Program Pencatatan Sipil	[KEGIATAN] 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	[KEGIATAN] 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	[KEGIATAN] 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas DUKCAPIL
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	[KEGIATAN] 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas DUKCAPIL

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	POL PP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	POL PP
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	POL PP
Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia (PD2)	[Program] 2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	[KEGIATAN] 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Arsip
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas DAMKARTAN
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	Dinas DAMKARTAN
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dinas DAMKARTAN
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dinas DAMKARTAN
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesbangpol
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	[KEGIATAN] 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan	Perangkat Daerah
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.13.02 Program Penataan Desa	[KEGIATAN] 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas PMD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.13.03 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	[KEGIATAN] 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas PMD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	[KEGIATAN] 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	[KEGIATAN] 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	[KEGIATAN] 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD
Transformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi (PD6)	[Program] 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	[KEGIATAN] 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah (PD8)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	BAPPERIDA
Membangun ekosistem Riset dan inovasi daerah (PD8)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	BAPPERIDA

Sedangkan indikator kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang mengacu pada prioritas dan sasaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Program dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I	URUSAN WAJIB						
A	TERKAIT PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN						
10.1.1.1.2	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Poin	64.88	73.53	75.26	DISDIK
		APK SD	Poin	110.7	102.05	100	
		APK SMP/MTs	Poin	110.36	101.71	100	
		PAUD Terakreditasi	Persen	34.6	42.1	43.6	
		SD Terakreditasi A	Persen	13.6	23.6	25.6	
		SMP Terakreditasi A	Persen	10.2	22.2	24.2	
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	98.24	99.18	100	
10.90.1.1.3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan local	Persen	45	60	60	DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	5	40	40	
10.90.1.1.4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	Persen	89.63	98.63	100	DISDIK
		Persentase PTK SD tersertifikasi	Persen	70.46	84.96	87.46	DISDIK
		Persentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	70.18	84.68	87.18	DISDIK
10.90.1.1.5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	1030	35	154	DISDIK
10.90.1.1.6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	DISDIK
		Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISDIK
2	KESEHATAN						
7.2.1.2.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita stunting	Persen	27,79	22,79	21,39	DIKES
		Angka Kematian Ibu	Kasus/100.000 KH	141	115	110	DIKES
		Angka Kematian Bayi	Kasus/1.00 KH	10	9	8.9	DIKES
		Indeks Kepuasan Layanan Rujukan	Poin	74	84	85	RSUD
7.90.1.2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar	Persen	80	100	100	DIKES
		Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80	100	100	RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.1.1.2.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang diterbitkan	Persen	70	95	100	DIKES
7.3.1.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persen	14	100	100	DIKES
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DIKES
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	RSUD
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
4.4.1.3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persen	45.72	86.95	89.56	DIS PUPR
6.3.1.3.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	Persen	77.28	85.01	86.56	DISPERKIM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.7.1.3.8	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah terbangun	Unit	2	3	10	DIS PUPR
4.7.1.3.9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata	m2	0	-	30,000	DIS PUPR
4.8.1.3.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	Persen	65.03	93.29	99.99	DIS PUPR
4.7.1.3.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat	Persen	0	0.35	2,10	DIS PUPR
5.5.1.3.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan	Regulasi	1	2	12	DIS PUPR
5.1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi layak dan aman	Persen	79.43	100	100	DIS PUPR/ DLH
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DIS PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
6.1.1.4.2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100	3.5	21,00	DISPERKIM
		Pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil)	Unit	1	3	3	DISPERKIM
6.1.1.4.3	Program Kawasan Permukiman	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	815.37	10	755.37	DISPERKIM
6.2.1.4.4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditangani	Persen	24.37	34,62	36,67	DISPERKIM
6.2.1.4.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	Persen	N/A	5.48	32.88	DISPERKIM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6.2.1.4.6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi	Persen	N/A	10	30	DISPERKIM
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISPERKIM
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
3.3.1.5.2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda yang ditegakkan	Persen	33.33	86	100	SATPOL PP
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.2.1.5.3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	Persen	16.55	23.74	25.18	BPBD
3.2.1.5.4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Menit	15	15	15	BPBD
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	BPBD
6	SOSIAL						
11.2.1.6.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang dibina	Persen	37.65	86.43	99.95	DINSOS
11.8.1.6.3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Orang	768	200	1	DINSOS
11.1.1.6.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	52,61	78,12	83,68	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11.4.1.6.5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Orang	230	730	830	DINSOS
3.2.1.6.6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	DINSOS
11.90.1.6.7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP Daerah yang dikelola	TMP Daerah	1	1	1	DINSOS
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DINSOS
B	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR						
7	TENAGA KERJA						
4.2.2.7.2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen	N/A	1	5	DISNAKERTRANS
4.2.2.7.3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlatih	Persen	87.36	92	93	DISNAKERTRANS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.2.2.7.4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar terserap	Persen	86.45	95	95	DISNAKERTRANS
4.2.2.7.5	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100	100	DISNAKERTRANS
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISNAKERTRANS
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
11.5.2.8.2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	Persen	53.85	84.61	92.3	DP3AP2KB
11.5.2.8.3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	100	100	100	DP3AP2KB
11.5.2.8.4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	Persen	32.41	87.96	98.38	DP3AP2KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
11.5.2.8.5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Data gender dan anak	Dokumen	N/A	1	5	DP3AP2KB
11.5.2.8.6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	KLA	KLA	DP3AP2KB
11.5.2.8.7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100	100	DP3AP2KB
9	PANGAN						
4.3.2.9.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	Persen	N/A	82	92	DISKETAPANG
4.3.2.9.3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi	Kkal/Kap/Hari	2.588.63	2.548,63	2.548,63	DISKETAPANG
		Konsumsi protein	Gram/Kap/Hari	79.6	74.6	73.6	DISKETAPANG
4.3.2.9.4	Program Penanganan	Rasio desa rawan pangan yang ditangani	Persen	0.3	0.57	0.6	DISKETAPANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kerawanan Pangan						
4.3.2.9.5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan	Persen	100	100	100	DISKETAPANG
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISKETAPANG
10	PERTANAHAN						
5.5.2.10.5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	N/A	100	100	DISPERKIM
5.5.2.10.8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase permukiman baru yang terbangun	Persen	N/A	100	100	DISPERKIM
5.5.2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Dokumen penatagunaan tanah	Dok	N/A	1	6	DISPERKIM
11	LINGKUNGAN HIDUP						
5.1.2.11.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan LH	Dokumen	N/A	-	1	DISLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.3.2.11.3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	Persen	56.15	56.65	56.75	DISLH
5.1.2.11.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luasan taman kehati	Ha	N/A	7	8	DISLH
5.2.2.11.5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3	Persen	100	100	100	DISLH
5.2.2.11.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	Persen	5	5	5	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.1.2.11.8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	Orang	N/A	4	20	DISLH
5.1.2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas	Persen	100	100	100	DISLH
5.1.2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.3	37.3	40.3	DISLH
		Persentase pengurangan sampah	Persen	16	21	22	DISLH
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISLH
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1.3.2.12.2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	97.13	99.48	99.95	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase penerbitan KIA	Persen	9,92	59,92	69,92	
		Persentase penerbitan surat pindah	Persen	N/A	100	100	
1.3.2.12.3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95.9	98,5	99	DISDUKCAPIL
1.3.2.12.4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama	Persen	4	14	16	DISDUKCAPIL
1.3.2.12.5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	0	3	15	DISDUKCAPIL
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISDUKCAPIL
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1.6.2.13.2	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7.87	19.69	22.05	DPMD
1.6.2.13.3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	Persen	73.94	91.55	97.89	DPMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.6.2.13.4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	19.69	39.37	43.31	DPMD
1.6.2.13.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang aktif	Persen	39.37	51.18	53.54	DPMD
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DPMD
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
7.4.2.14.2	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.8	2.6	2.55	DP3AP2KB
7.4.2.14.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS akseptor KB	Persen	58.5	63.5	64.5	DP3AP2KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.4.2.14.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Persen	62.65	67.65	68.65	DP3AP2KB
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DP3AP2KB
15	PERHUBUNGAN						
4.8.2.15.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	Persen	41.87	72.44	79.9	DISHUB
4.8.2.15.3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut		N/A	80	100	DISHUB
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISHUB
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.9.2.16.2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	Persen	72.73	94.53	100	DISKOMINFO
4.9.2.16.3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	Persen	60	95	100	DISKOMINFO
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISKOMINFO
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
4.1.2.17.2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (unit)	Unit	245	20	120	DISKOP UKM
4.1.2.17.3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan	Persen	12	72	96	DISKOPUKM
4.1.2.17.4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laporan tingkat kesehatan KSP/USP (dokumen)	Dokumen	1	1	6	DISKOPUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.1.2.17.5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih	Persen	24,49	85,71	97,96	DISKOPUKM
4.1.2.17.6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	Persen	0.19	0.94	1.13	DISKOPUKM
4.1.2.17.7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan omset aset UMKM	Persen	0	35	38	DISKOPUKM
4.1.2.17.8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Unit	0	3	14	DISKOPUKM
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISKOPUKM
18	PENANAMAN MODAL						
4.90.2.18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN	Rupiah	583,136,792,100	588,407,000,000	589,467,000,000	DPMPPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Nilai investasi PMA	Rupiah	1,288,573,501,709	1,293,739,000,000	1,294,774,000,000	
4.90.2.18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M	Proyek	253	289	297	DPMPTSP
4.90.2.18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	Persen	100	100	100	DPMPTSP
4.90.2.18.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Wajib Laport LKPM yang melapor	Persen	35,95	36,85	37,02	DPMPTSP
4.90.2.18.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data base Sistem Informasi Perijinan Penanaman Modal	Database	1	1	1	DPMPTSP
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DPMPTSP
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
10.10.2.19.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi	Orang	6	5	26	DISPORA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10.10.2.19.3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi	Orang	39	59	64	DISPORA
10.10.2.19.4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang dilatih	Persen	20	60	70	DISPORA
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISPORA
20	STATISTIK						
1.3.2.20.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	Instansi	55	58	58	DISKOMINFO
21	PERSANDIAN						
4.9.2.21.2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi daerah yang diamankan	Persen	100	100	100	DISKOMINFO
22	KEBUDAYAAN						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10.11.2.22.2	Program Pengembangan Kebudayaan	jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	Event	23	38	38	DISPARBUD
10.11.2.22.3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	Persen	100	100	100	DISPARBUD
10.11.2.22.5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah situs yang dilestarikan	Buah	10	10	10	DISPARBUD
23	PERPUSTAKAAN						
10.4.2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	-76.06	16	17	DISPUSTAKA ARSIP
10.4.2.23.3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Naskah Kuno	0	3	3	DISPUSTAKA ARSIP
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISPUSTAKA ARSIP
24	KEARSIPAN						
1.90.2.24.2	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan pengelolaan kearsipan	Persen	70	90	95	DISPUSTAKA ARSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.90.2.24.3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pesentase arsip terselamatkan	Persen	60	85	90	DISPUSTAKA ARSIP
1.90.2.24.4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Izin	0	3	3	DISPUSTAKA ARSIP
C	PILIHAN						
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
4.3.3.25.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3,039.30	4,010.04	4,238.61	DISLUTKAN
4.3.3.25.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan	Ekor	7,100,000	9,003,777	9,484,344	DISLUTKAN
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,409.90	54,385.21	57,158.86	DISLUTKAN
4.3.3.25.5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani	Persen	-	100	100	DISLUTKAN
4.3.3.25.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan	Ton	4,405.45	4,863.97	4,961.25	DISLUTKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		kelautan dan perikanan					
		Produksi garam rakyat	Ton	3,438.15	3,613.53	3,649.67	DISLUTKAN
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISLUTKAN
26	PARIWISATA						
8.1.3.26.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20	95	100	DISPARBUD
8.1.3.26.3	Program Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif	Media	1	1	1	DISPARBUD
8.1.3.26.5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	240	100	800	DISPARBUD
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISPARBUD
27	PERTANIAN						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.3.3.27.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas pertanian unggulan :					DISTAN
		- Padi (GKG)	Ton/Tahun	318,322	325,643	326,277	
		- Tembakau	Ton/Tahun	20,224	22,328.93	22,775.51	
		- Melon	Kw/Tahun	15,320	13,851	13,961	
		- Sapi	Ekor/Tahun	179,189	204,320	209,939	
4.3.3.27.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Poin	50	50	50	DISTAN
4.3.3.27.4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kenaikan prosentase penerapan biosecurity budidaya ternak	Persen	30	37	38	DISTAN
4.3.3.27.5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman	Persen	30	20	20	DISTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.3.3.27.6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan	Rekomendasi	260	260	1560	DISTAN
4.3.3.27.7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Persen	5	5	30	DISTAN
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISTAN
28	PERDAGANGAN						
4.1.3.30.2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A	90	90	DISPERINDAN G
4.1.3.30.3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	nilai omset perdagangan	Juta Rupiah	114,502.22	117,002.22	117,502.22	DISPERINDAN G
4.1.3.30.4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Operasi Pasar	Kali	N/A	2	10	DISPERINDAN G
4.1.3.30.5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai transaksi pameran	Rp	0	800,000,000	1,000,000,000	DISPERINDAN G

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4.1.3.30.6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pasar tertib ukur	Pasar	0	12	15	DISPERINDAN G
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	DISPERINDAN G
29	PERINDUSTRIAN						
4.7.3.31.2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	100	100	100	DISPERINDAN G
30	TRANSMIGRASI						
11.90.3.32.3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang difasilitasi	Persen	100	100	100	DISNAKERTRANS
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
31	SEKRETARIAT DAERAH						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.4.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	SETDA
		Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	
1.1.4.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	SETDA
		Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	SETDA
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	50	80	85	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.4.1.1	Program Administrasi Umum	Persentase kebijakan Administrasi umum dan Tata Usaha Pimpinan serta kerumahtanggaan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	SETDA
		Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	SETDA
		Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan.	Persen	100	100	100	SETDA
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	
32	SEKRETARIAT DPRD						
1.1.4.2.1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan	Dokumen	39	43	43	SET DPRD
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	SET DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.4.2.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	Persen	60	72.5	75	SET DPRD
		Jumlah berita yang dipublikasikan	Berita	733	760	760	SET DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
33	PERENCANAAN						
1.3.5.1.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	BAPPEDA
1.3.5.1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	Persen	100	100	100	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	Persen	100	100	100	BAPPEDA
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	Persen	100	100	100	BAPPEDA
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	BAPPEDA
34	KEUANGAN						
1.1.5.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Ketepatan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	BPKAD
		Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Hari kerja	2	2	1	BPKAD
1.1.5.2.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Validasi data aset	Persen	96	98.5	99	BPKAD
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	BPKAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rupiah	203,926,708,187.53	320,966,783,286	348,301,078,060	BAPENDA
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	BAPENDA
35	KEPEGAWAIAN						
1.3.5.3.2	Program Kepegawaian Daerah	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	0	38	40	BKPP
		Prosentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu	Persen	70	95	95	BKPP
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	BKPP
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.90.5.4.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	Persen	60	70	72	BKPP
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1.4.5.5.2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	Persen	100	100	100	BAPPEDA
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
38	INSPEKTORAT DAERAH						
1.90.6.1.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintah daerah	Persen	95	95	95	ITDA
1.90.6.1.3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang	Persen	72.73	95.45	100	ITDA
		menyusun manajemen					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		risiko dengan kategori					
		maturitas terdefinisi,					
		terkelola dan terukur					
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	ITDA
G	UNSUR KEWILAYAHAN						
39	KECAMATAN						
1.6.7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	Persen	100	100	100	KECAMATAN
1.6.7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	Persen	15	20	25	KECAMATAN
1.6.7.1.4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	Persen	100	100	100	KECAMATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.6.7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	Persen	100	100	100	KECAMATAN
1.6.7.1.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persen	85	97	100	KECAMATAN
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	KECAMATAN
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.1.8.1.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	Persen	100	100	100	BAKESBANGP OL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.8.1.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	Persen	74	-	76	BAKESBANGP OL
		Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	Persen	100	100	100	BAKESBANGP OL
		Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	Persen	10	60	65	BAKESBANGP OL
1.1.8.1.4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	Persen	85	92	93	BAKESBANGP OL
1.1.8.1.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	Persen	N/A	61.54	69.23	BAKESBANGP OL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target 2025	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ekonomi, Sosial, dan Budaya						
1.1.8.1.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial	Persen	100	100	100	BAKESBANGP OL
1.1.X.XX. 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	BB	BAKESBANGP OL

4.5 Program Prioritas Pendukung Program Nasional

Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goal's* (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.5.1. Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari:

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
3. Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
4. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
5. Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
7. Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
8. Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintah dalam upaya penurunan stunting

Sebagai salah satu bentuk penguatan integrasi perencanaan daerah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, maka dalam RKPD tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap mengalokasikan perencanaan terkait hal tersebut. Perpres ini masih menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13,5% di tahun 2025 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

- a. penguatan perencanaan dan anggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2025, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
7. Program Pemberdayaan Sosial;
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.5.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan). Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2025 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (COVID-19, TB, HIV/AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2025 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial

masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.5.3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga diintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan. Pada tahun 2025, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evaluasi capaian SDG's tahun 2023. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (goal) berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP.

4.5.4. -Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dimaksudkan:

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dalam menyusun dokumen awal RKPD Tahun Anggaran 2025.
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Tengah melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang lebih baik.



5

**RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH
PERUBAHAN RKPD 2025**

Rencana program memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan perangkat daerah (PD) yang bertanggungjawab serta memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur pada tingkat capaiannya. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program Pembangunan.

Adapun dalam menentukan indikator kinerja dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan riil anggaran;
2. Menentukan keluaran/ *output* setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu anggaran pada setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu anggaran pada setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
5. Menghitung alokasi pagu anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.

Kebutuhan pendanaan per perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 di sajikan secara rinci pada table 5.1.



6

**KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PERUBAHAN RKPD 2025**

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Daerah 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indicator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

6.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. IKU Daerah, secara berjenjang akan dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
1	Indeks Toleransi	Poin	3,72	3,84
2	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100
3	IPM	Poin	66.43	71.23
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	B
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-6.68	4.50 – 6.00
6	Angka Kemiskinan	Persen	13.44	11.98 – 12.31
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.74	2.57 – 2.63
8	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	71.05
9	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	NA	100
10	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	-20.43	3.75

6.2. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 juga memuat indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-

2026 yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum sebagai berikut.

Tabel 6.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2025

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-6.68	4.50 – 6.00
	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-3.05	3.53
	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	-20.43	3.75
	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	-0.42	1.46
	Angka Kemiskinan	Persen	13.44	11.98 – 12.31
	Indeks Gini	Poin	0.331	0.343 – 0.328
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.74	2.57 – 2.63
A.2	Fokus Kesejahteraan Sosial			
	IPM	Poin	66.43	71.23
	Indeks Pendidikan	Poin	0.589	0.606
	PAUD Terakreditasi	Persen	34.6	42.1
	SD Terakreditasi A	Persen	13.6	23.6
	SMP Terakreditasi A	Persen	10.2	22.2
	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	Persen	89.63	98.63
	Persentase PTK SD tersertifikasi	Persen	70.46	84.96
	Persentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	70.18	84.68
	Indeks Kesehatan	Poin	0.711	0.729
	Angka Kematian Ibu	Kasus/100.000 KH	141	115
	Angka Kematian Bayi	Kasus/1.000 KH	10	9
A.3	Fokus Seni Budaya dan Olah raga			
	Jumlah atlit berprestasi	Orang	39	59
	Persentase krame adat aktif	Persen	NA	80
	Jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	Event	23	38
	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	Persen	100	100
B.	Aspek Pelayanan Umum			
B.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib			
B.1.1	TERKAIT PELAYANAN DASAR			
B.1.1.1	PENDIDIKAN			
	APK PAUD	Poin	64.88	73.53
	APK SD	Poin	110.7	102.05
	APK SMP/MTs	Poin	110.36	101.71

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
	Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	98.24	99.18
	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan local	Persen	45	60
	Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	5	40
	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	1.03	35
	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100
B.1. 1.2	KESEHATAN			
	Persentase balita stunting	Persen	27,79	22,79
	Indeks Kepuasan Layanan Rujukan	Poin	74	84
	Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar	Persen	80	100
	Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80	100
	Persentase PIRT yang diterbitkan	Persen	70	95
	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persen	14	100
B.1. 1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persen	45.72	86.95
	Gedung pemerintah terbangun	Unit	2	3
	Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata	M2	0	0
	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat	Persen	0	0.35
	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan	Regulasi	1	2
	Persentase akses sanitasi layak dan aman	Persen	79,43	100
B.1. 1.4	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/tahun	815.37	765.37
	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100	3.5
	Pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil)	Unit	1	3
	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	815.37	10
	Persentase RTLH yang ditangani	Persen	24.37	34.62
	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	Persen	N/A	5.48
	Persentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi	Persen	N/A	10

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
B.1.1.5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Persentase Perda yang ditegakkan	Persen	33.33	86
	Persentase desa tangguh bencana	Persen	16.55	23.74
	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Menit	15	15
B.1.1.6	SOSIAL			
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	52.61	78.12
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100	100
	Persentase PMKS yang dibina	Persen	37.65	86,43
	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Orang	768	200
	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Orang	230	730
	Jumlah TMP Daerah yang dikelola	TMP daerah	1	1
B.1.2	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR			
B.1.2.1	TENAGA KERJA			
	Persentase tenaga kerja yang terlatih	Persen	87.36	92
	Persentase tenaga kerja terdaftar terserap	Persen	86.45	95
	Dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen	0	1
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100
B.1.2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	Persen	53.85	84.61
	Capaian Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	KLA
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	100	100
	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	Persen	32.41	87.96
	Data gender dan anak	Dokumen	0	1
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100
B.1.2.3	PANGAN			
	Konsumsi energi	Kkal/Kap/Hari	2.588,63	2.548,63
	Konsumsi protein	Gram/Kap/Hari	79.6	74.6
	Rasio desa rawan pangan yang ditangani	Persen	0.3	0.57
	Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan	Persen	100	100
	Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	Persen	N/A	82

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
B.1.2.4	PERTANAHAN			
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	N/A	100
	Persentase permukiman baru yang terbangun	Persen	N/A	100
	Dokumen penatagunaan tanah	Dokumen	N/A	1
B.1.2.5	LINGKUNGAN HIDUP			
	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	Persen	56.15	56.65
	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.3	37.3
	Persentase pengurangan sampah	Persen	16	21
	Jumlah dokumen perencanaan LH	Dokumen	N/A	-
	Luasan taman kehati (ha)	Ha	N/A	7
	Persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3	Persen	100	100
	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	Persen	5	5
	Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	Orang	N/A	4
	Persentase pengaduan kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas	Persen	100	100
B.1.2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	97.13	99.48
	Persentase penerbitan KIA	Persen	9,92	59,92
	Persentase penerbitan surat pindah	Persen	N/A	100
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95.9	98,5
	Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama	Persen	4	14
	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	0	3
B.1.2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Persentase lembaga adat desa yang aktif	Persen	39.37	51.18
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7.87	19.69
	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	Persen	73.94	91.55
	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	19.69	39.37
B.1.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Persentase PUS akseptor KB	Persen	58.5	63.5
	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.8	2.6
	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Persen	62.65	67.65
B.1.2.9	PERHUBUNGAN			
	Persentase sarpras keselamatan jalan	Persen	41.87	72.44
	Persentase penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Persen	N/A	80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
B.1. 2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	Persen	72.73	94.53
	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	Persen	60	95
B.1. 2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Pertumbuhan omset aset koperasi	Persen	0.19	0.94
	Pertumbuhan omset aset UMKM	Persen	0	35
	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Unit	245	20
	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan	Persen	12	72
	Laporan tingkat kesehatan KSP/USP	Dokumen	1	1
	Persentase koperasi yang dilatih (%)	Persen	24,49	85,71
	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Unit	0	3
B.1. 2.12	PENANAMAN MODAL			
	Nilai investasi PMDN	Rupiah	583,136,792,100	588,407,000,000
	Nilai investasi PMA	Rupiah	1,288,573,501,709	1,293,739,000,000
	Persentase Perusahaan Wajib Laporkan LKPM yang melapor	Persen	35,95	36,85
	Data base Sistem Informasi Perijinan Penanaman Modal	Database	1	1
B.1. 2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	6	5
	Persentase anggota Pramuka yang dilatih	Persen	20	60
B.1. 2.14	STATISTIK			
	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	Instansi	55	58
B.1. 2.15	PERSANDIAN			
	Persentase informasi daerah yang diamankan	Persen	100	100
B.1. 2.16	KEBUDAYAAN			
	Jumlah situs yang dilestarikan	Buah	10	10
B.1. 2.17	PERPUSTAKAAN			
	Peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	-76.06	16
	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Naskah Kuno	0	3
B.1. 2.18	KEARSIPAN			
	Cakupan pengelolaan kearsipan	Persen	70	90
	Persentase arsip terselamatkan	Persen	60	85

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Izin	0	3
B.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan			
B.2.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Produksi Benih Ikan	Ekor	7,100,000	9,003,777
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,409.90	54,385.21
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3,039.30	4,010.04
	Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani	Persen	-	100
	Produksi olahan kelautan dan perikanan	Ton	4,405.45	4,863.97
	Produksi garam rakyat	Ton	3,438.15	3,613.53
B.2.2	PARIWISATA			
	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20	95
	Media promosi online yang aktif	Media	1	1
	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	240	100
B.2.3	PERTANIAN			
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Padi (GKG)	Ton/Tahun	318,322	325,643
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Tembakau	Ton/Tahun	20,224	22,328.93
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Melon	Kw/Tahu	15,320	13,851
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Sapi	Ekor/Tahun	179,189	204,320
	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Poin	50	50
	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan	Rekomendasi	260	260
	Kenaikan prosentase penerapan <i>Biosecurity</i> budidaya ternak	Persen	30	37
	Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman	Persen	30	20
	Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Persen	5	5
B.2.4	PERDAGANGAN			
	Nilai omset perdagangan (Rp.)	Juta Rupiah	114,502.22	117,002.22
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A	90
	Operasi Pasar	Kali	N/A	2
	Nilai transaksi pameran	Rp	0	800,000,000
	Pasar tertib ukur	Pasar	0	12
B.2.5	PERINDUSTRIAN			
	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
B.2.6	TRANSMIGRASI			
	Persentase transmigran yang difasilitasi	Persen	100	100
B.2.7	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
B.2.7.1	SEKRETARIAT DAERAH			
	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100	100
	Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan	Persen	100	100
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	50	80
	Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100	100
	Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	100
	Persentase kebijakan administrasi umum dan tata usaha pimpinan serta kerumahtanggaan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100
	Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100
	Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan.	Persen	100	100
B.2.7.2	SEKRETARIAT DPRD			
	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	Persen	60	72.5
	Jumlah Berita yang dipublikasikan	Berita	733	760
	Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan	Dokumen	39	43
B.2.8	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
B.2.8.1	PERENCANAAN			
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	Persen	100	100
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	Persen	100	100
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	Persen	100	100
B.2.8.2	KEUANGAN			
	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Ketepatan	Tepat waktu	Tepat waktu

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
	Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Hari kerja	2	2
	Validasi data aset	Persen	96	98.5
B.2. 8.3	KEPEGAWAIAN			
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	0	38
	Persentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu	Persen	70	95
B.2. 8.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	Persen	60	70
B.2. 8.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100
B.2. 8.6	INSPEKTORAT DAERAH			
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan pada pemerintah daerah	Persen	95	95
	Persentase OPD yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur	Persen	72.73	95.45
B.2. 9	UNSUR KEWILAYAHAN			
B.2. 9.1	KECAMATAN			
	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	Persen	100	100
	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	Persen	100	100
	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	Persen	100	100
	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persen	85	97
	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	Persen	15	20
B.2. 10	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
B.2. 10.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Persentase penyelesaian konflik sosial	Persen	100	100
	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	Persen	100	100
	Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	Persen	74	-
	Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	Persen	100	100
	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	Persen	10	60
	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	Persen	85	92

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target 2025
	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	Persen	N/A	61,54
C.	Aspek Daya Saing Daerah			
C.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	9,95	10,06
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,51	61,10
	Realisasi penerimaan PAD	Rupiah	203,926,708,187.53	320,966,783,286
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	71.05
	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	56.1	68.6
	Indeks konektivitas	Poin	NA	93.248
	Persentase jalan mantap	Persen	65.03	93.29
	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	Persen	77.28	85.01
	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.3	27.3
C.3	Fokus Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia			
	Indeks Toleransi	poin	3,72	3,84
	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100
	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100
	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	80	95
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	B
	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B
	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	NA	100
	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M	Proyek	253	289
	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	Persen	100	100
	Indeks Resiko Bencana	Poin	NA	155,95



PENUTUP
PERUBAHAN RKPD 2025

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas perencanaan juga sangat ditentukan oleh komitmen para pengelola program pembangunan dan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai implementasi tujuan di atas disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 yang merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai pedoman menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah agar menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD 2025.



mandalika
the heart of lombok

